

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
TERHADAP PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MUSLIM
DI KOTA MAKASSAR (TINJAUAN PERSPEKTIF ISLAM)**

Andi Sulfati
STIEM Bongaya
Email : andisulfati@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan yang patut bagi Pemerintah Kota Makassar untuk segera memaksimalkan peran yang dimilikinya terutama dalam pembuatan perencanaan strategis dalam pengentasan kemiskinan yang saat ini masih meresahkan masyarakat, karena Kota Makassar bertujuan menuju Kota Dunia dan yang berdampak sosial pada urbanisasi. Pemerintah Kota Makassar memberdayakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengentaskan kemiskinan dengan salah satu konsepnya berlandaskan Al-qur'an yang dapat menanggulangi hambatan pemberdayaan kelompok usaha bersama masyarakat setempat. Salah satu program andalan Dinas Sosial Kota Makassar yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memajukan pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan KUBE, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kesejahteraan.

**EMPOWERMENT EFFECTIVENESS OF KELOMPOK USAHA BERSAMA
(KUBE) ON ECONOMIC STRENGTHENING MUSLIM COMMUNITY
IN MAKASSAR CITY (ISLAMIC PERSPECTIVE REVIEW)**

Andi Sulfati
STIEM Bongaya
Email : andisulfati@gmail.com

ABSTRACT

Poverty is an appropriate issue for the Makassar City Government to immediately maximize its role, especially in making strategic planning in poverty alleviation that is currently still unsettling for the community because Makassar City aims towards a World City and which has a social impact on urbanization. The Makassar City Government empowers the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) to alleviate poverty with one of its concepts based on the Qur'an which can overcome obstacles in empowering business groups with the local community. One of the main programs of the Makassar City Social Service is the Usaha Ekonomi Produktif (UEP), one of the government's efforts to improve and advance national development, particularly in the economic sector and social welfare of the community.

Key Words : Poverty, KUBE Empowerment, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Welfare.

LATAR BELAKANG

Pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam teori pembentukan negara. Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai

lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar atas kemajuan kesejahteraan rakyat termasuk dalam pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan perkembangan kota Makassar, khususnya tujuan kota Makassar yang menuju kota dunia, menjadi sebuah daya tarik yang kuat yang dapat menjanjikan berbagai harapan dan berbagai macam tujuan. Sehingga salah satu akibat munculnya dampak sosial diantaranya adalah urbanisasi. Urbanisasi dapat memacu pertumbuhan populasi komunitas masyarakat marginal yang semakin pesat, maka kota Makassar mau tidak mau akan diperhadapkan pada permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, diantaranya adalah permasalahan kemiskinan. Semakin pesatnya pertumbuhan populasi masyarakat di kota Makassar merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan pemerintah kota Makassar dalam mencari solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan hingga ke level terendah, sehingga masalah kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang mustahil untuk dituntaskan. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial Kota Makassar telah dijelaskan bahwa Dinas Sosial juga memiliki tugas dalam penuntasan masalah kemiskinan.

Terlihat jelas bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang patut bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk segera memaksimalkan peran yang dimiliki terutama dalam pembuatan perencanaan strategis dalam pengentasan kemiskinan yang saat ini masih meresahkan masyarakat. Bilamana telah terjadi penurunan angka kemiskinan, maka patut pula untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Al-Qur'an tentang kemiskinan?
2. Bagaimana Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Makassar?
3. Apa kendala dan hambatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Makassar?

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat diberikan hak untuk mengelola sumber daya, merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dan mengelola dana sendiri, baik berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Merebaknya paradigma pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan *Good Governance*. Pengertian *Good Governance* menurut Bank Dunia dalam Mardiasmo adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi, investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dapat disimpulkan, *Good Governance* adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan citra baik pemerintah khususnya dalam lingkup pengendalian sistem pembangunan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), fokus UNDP memandang *Good Governance* adalah penekanan adanya sharing kekuasaan dan daya kemampuan dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan menurut Thoha dalam Sulistiyan, *Good Governance* adalah tata pemerintah yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*), atau *civil society* (*business*) yang berada disektor swasta.

Dalam konteks *Good Governance*, pemerintah diposisikan sebagai fasilitator, sedangkan pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara (dunia usaha dan masyarakat). Konsep *Good Governance* merujuk pada tiga pilar yaitu *public governance, corporate governance* dan *civil society*.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, antara lain kemandirian berfikir, bertindak, mengendalikan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material. Kondisi kognitif merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi pengetahuan untuk mencari solusi atas permasalahan. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang diarahkan pada perilaku sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam melakukan aktivitas pembangunan. Kondisi afektif merupakan *sense* masyarakat diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Aspek-aspek tersebut dapat menciptakan kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses yaitu proses belajar. Menurut Paul Freire dalam Keban & Lele, pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan melalui suatu proses belajar sehingga mencapai suatu proses mandiri. Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap tersebut meliputi tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; tahap transformasi kemampuan; tahap peningkatan kemampuan intelektual; dan kedewasaan sikap masyarakat.

Tabel 1.
Tahapan Pemberdayaan
Dengan Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif

Tahapan Afektif	Tahapan Kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai keterampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Tabel di atas mengenai pola pikir linear, dalam pengertian pada aspek pemberdayaan yang meliputi afeksi, kognisi, psikomotorik dan konasi akan berbanding lurus satu sama lain. Pada kondisi kesadaran afeksi yang tinggi belum disertai realitas perilaku yang sepadan atau tidak diimbangi oleh penguasaan keterampilan. Mengingat ternyata kejadian atau fenomena dalam masyarakat tidak selalu berbanding mengikuti garis lurus.

Pendekatan Pemberdayaan

Akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif yaitu :

1. Sebagai sudut pandang konfliktual. Pendapat ini diwarnai oleh pemahaman bahwa pihak kedua yang berhadapan tersebut sebagai fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya yaitu pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok yang lemah. Proses pemberian daya kepada kelompok lemah berakibat pada berkurangnya daya pada kelompok lain. Sudut pandang ini populer dengan istilah *zero-sum*.
2. Manakala terjadi pemberdayaan dari pihak yang berkuasa kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat daya pihak pertama. Pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan kepada pihak yang lemah. Disamping itu keyakinan yang dimiliki oleh sudut pandang ini adalah adanya penekanan aspek generatif. Sudut pandang ini populer dengan nama *positive-sum*.

Model Kemitraan dalam Pembangunan Nasional

Pemerintah dalam hal ini sudah lebih transparan dan mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif. Swasta hendaknya mampu memberikan kontribusi dalam memberikan energi untuk melaksanakan pemberdayaan bersama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat hendaknya mampu memanfaatkan peluang untuk memberikan peran aktif melalui partisipasi yang koheren. Pembentukan kemampuan atau daya di dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Pada masa orde baru, membangun legitimasi keberdayaan masyarakat melalui proses pendekatan terpusat. Pendekatan ini sering dinyatakan dalam bentuk pembangunan dari pemerintah oleh pemerintah untuk rakyat. Pemaknaan pendekatan dari pemerintah oleh pemerintah untuk masyarakat :

1. Datangnya ide, rencana pembangunan dan sekaligus proses perencanaan dan penetapan keputusan datangnya dari pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat.
2. Implementasi kebijakan pembangunan juga dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan aktor-aktor masyarakat seperti tokoh masyarakat, kaum profesional, para ahli dibidang tertentu, ormas-ormas sebagai figur masyarakat.

Sedikit banyak pendekatan ini sudah mencerminkan suatu watak kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi kemitraan yang terbentuk ternyata masih timpang karena belum ada unsur swasta didalamnya. Pada kenyataannya dominasi pemerintah masih besar. Peran masyarakat dalam proses perencanaan sebagaimana terespresikan melalui perencanaan dari bawah, terkesan hanyalah formalitas belaka. Pendekatan pembangunan yang ketiga dilontarkan sebagai upaya merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah. Pemaknaan pendekatan ini adalah :

1. Datangnya ide dan perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang bersifat kasuistik. Pemerintah memberikan fasilitas konsultasi, informasi data, anggaran, dan tenaga ahli yang dibutuhkan.

2. Masyarakat mengimplementasikan sendiri apa yang telah direncanakan dengan fasilitas pemerintah baik berupa anggaran, tenaga ahli, teknologi, dan lain-lain.
3. Kemanfaatan hasil pembangunan untuk masyarakat dan sekaligus untuk manajemen hasil pembangunan juga dilakukan dalam sistem sosial masyarakat dimana mereka tinggal.

PEMBAHASAN

Pengertian KUBE

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah usaha bagi para keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh, dari dan untuk mereka sendiri yang dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fokus kegiatan KUBE adalah melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan dan kekeluargaan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sosial anggota. Secara operasional usaha melalui program KUBE dilaksanakan secara kelompok dengan jumlah anggota kurang lebih 10 anggota (Syahrudin, 2012). KUBE dibentuk dilandasi nilai filosofi dari, oleh dan untuk masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok usaha bersama dimanapun (desa atau kota) adalah berasal dari dan berada di tengah-tengah masyarakat. Pembentukannya oleh masyarakat setempat dan peruntukannya juga untuk anggota dan masyarakat setempat.

Pada dasarnya pengembangan masyarakat itu merupakan suatu metode atau juga proses. Antara keduanya sukar dibedakan, sebab penerapan metode itu akan terlihat hasilnya dalam proses (Moris King dalam Suyanto, 1987). Proses yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan terhadap masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Pernyataan ini sesuai dengan keadaan masyarakat yang selalu berkembang, konsep pengembangan masyarakat berlangsung juga lewat proses yang berlangsung secara terus menerus. Dan tidak bisa dipungkiri juga dengan keadaan masyarakat yang selalu ingin maju, senantiasa ingin lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, penerapan pengembangan masyarakat selalu dimulai dengan tanggapan terhadap masalah yang menyangkut kebutuhan masyarakat, walaupun memang tidak selamanya kebutuhan masyarakat itu tampak dengan jelas dan dimulai dengan pelaksanaan tanggapan permasalahan. Oleh karena itu, strategi pengembangan masyarakat harus selalu melibatkan anggota/warga atau masyarakat yang bersangkutan untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan bersama yang mereka hadapi.

Menurut Moris King, pengembangan masyarakat secara lebih luas harus bersemboyan dari, oleh dan untuk masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa keberhasilannya tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat dan bimbingan pembinaannya. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan pengembangan masyarakat faktor terpenting yang harus ada adalah partisipasi masyarakat. Bentuk pengembangan masyarakat apapun yang dilakukan selalu dasar pendekatannya adalah pendekatan partisipasi (Saleh Abdullah, 1977). Karena titik pusat pembangunan suatu masyarakat adalah pembangunan manusia, maka masyarakat (untuk kepentingan mereka sendiri), harus menyadari pentingnya keikutsertaan mereka dalam mensukseskan program pembangunan itu, sebab tanpa partisipasi mereka pembangunan tidak mungkin berlangsung. Suatu kegiatan pengembangan masyarakat tidak mungkin terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya bila tidak ada dukungan dan partisipasi anggota masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan oleh Selo Soemardjan (1962), bahwa pembangunan masyarakat hanya dapat tercapai bila sistem yang dilakukan mendapat tanggapan yang menguntungkan dari masyarakat yang akan dibangun.

Permasalahan kesejahteraan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, menuntut para Da'i untuk melakukan adanya inovasi yang baru dalam dakwah. Tidak hanya berdiri dibelakang mimbar, tetapi harus turun tangan pada permasalahan yang terjadi. Ini merupakan sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh dari tindakan nyata ini adalah menjadi seorang pendamping atau penyuluh disebuah wilayah yang bisa dikategorikan sebagai wilayah yang dilanda oleh permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa diatasi dengan potensi-potensi yang ada wilayah itu sendiri. Untuk proses pembebasan itu dibutuhkan peranan individu maupun kelompok.

Sedangkan istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Walaupun pemberdayaan adalah kata yang telah digunakan secara berlebihan dan sedang berada dalam bahaya kehilangan arti substantifnya. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan. (Machendrawati dan Ahmad Safei, 2001). Banyak contoh pengembangan masyarakat pedesaan yang bisa dikemukakan, baik pembangunan dari atas (*top-down*) seperti tipologi desa swasembada, swakarya, dan swadaya atau dari bawah (*bottom up*) seperti desa miskin, sedang dan desa makmur. Juga bisa menggunakan tipologi lain seperti desa rawan, desa tandus, desa subur atau tipologi desa yang oleh Mubyarto (1994) didasarkan pada mata pencaharian penduduknya. (Rr. Suhartini, dkk, 2005). Menurut Agus Efendi, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keutamaan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran rohaniah, intelektual dan ekonomi.

Dalam pemberdayaan masyarakat menurut Isbandi (2003), partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Strategi yang bisa diterapkan adalah melalui strategi penyadaran masyarakat. Untuk berhasilnya program pembangunan desa tersebut warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis, tetapi ada keterlibatan emosional pada program tersebut. (Syahrudin, 2012). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi merupakan sebuah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki setiap individu guna mencapai tingkat kesejahteraan sosial. Maka dari itu, membuat Kelompok Usaha Bersama merupakan potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Menurut Boediono (2002), mengemukakan bahwa kegiatan manusia dalam suatu masyarakat bisa diringkas menjadi tiga macam kegiatan ekonomi pokok, yaitu : kegiatan produksi; kegiatan konsumsi; dan kegiatan pertukaran. Faktor penggerak yang sangat dasar bagi adanya aktivitas ekonomi adalah adanya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah tujuan dan sekaligus motivasi dari kegiatan berproduksi, konsumsi dan tukar menukar. Kebutuhan manusia timbul dari kebutuhan biologis untuk hidup (makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal); kebutuhan yang timbul dari peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri (misalnya keinginan rumah yang baik, keinginan mendapatkan pendidikan, pekerjaan, keinginan akan makanan lezat dan sebagainya); dan lain-lain (kebutuhan yang khas masing-masing perorangan).

Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dan pada hakikatnya kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya

akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan dari berbagai multidisipliner keilmuan pun terus menerus dikembangkan oleh para akademisi maupun praktisi untuk menyibak tirai dan mungkin misteri mengenai kemiskinan ini. Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi belaka, melainkan juga bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi, sosial, budaya dan politik. Karena sebab multidimensional tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*) saja, akan tetapi lebih dari itu.

Dalam diskursus mengenai kemiskinan ini sendiri, ada tiga pandangan yang berkembang, yaitu konservatisme, liberalisme dan radikalisme. Penganut masing-masing pandangan memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatis memandang bahwa kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis dan tidak ada hasrat untuk berprestasi. Menurut Oscar Lewis, orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup psikologis, sosial dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic* dan *situasional adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Sedangkan kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif.

Implikasi kemiskinan yang melibatkan pandangan-pandangan tersebut menjadikan kemiskinan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Memahami kemiskinan tentunya tidak hanya dapat dilihat dari satu segi dan satu sudut pandang saja, melainkan harus mampu membacanya dalam kerangka multidisipliner yang komprehensif. Secara sederhana, sebagaimana yang dinyatakan oleh Parsudi Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya yang muncul dalam masyarakat yang bersangkutan. Prioritas pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, di mana dalam pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hampir 70 tahun sudah konstitusi tersebut digagas, namun dalam realitas yang dihadapi, kemiskinan makin meningkat tajam sedangkan upaya untuk menanggulangnya masih jauh dari harapan dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi. Kemiskinan bahkan menjadi wacana yang paling krusial ketimbang wacana lainnya, misalnya, iklim, terorisme, dan perang.

Berdasarkan data yang dirilis Sam Mountford, prosentasi survei adalah sebagai berikut : kemiskinan ekstrim 71 %, lingkungan 64 %, meningkatnya harga pangan dan energy 63 %, terorisme dan HAM serta penyebaran penyakit 59 %, ekonomi dunia 58 %, dan isu perang 57 %. Lebih lanjut, suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Selama periode 2013-2015, Garis Kemiskinan Indonesia mengalami

peningkatan setiap tahun, pada tahun 2013 Rp 271.626,- menjadi Rp 330.776,- di tahun 2015.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan di Indonesia bukan merupakan masalah baru. Bahkan masalah kemiskinan tersebut telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak permulaan abad 20 ketika pemerintah kolonial Belanda meluncurkan suatu program anti kemiskinan yang dikenal dengan politik etis. Sesudah Indonesia merdeka, masalah kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia, baik dari masa orde lama, orde baru bahkan sampai masa reformasi pada detik ini. Meskipun usaha demi usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi kemiskinan, namun masalah tersebut tetap hidup bersama bangsa ini. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan sejak tahun 1998, sampai saat ini secara umum program-program tersebut telah mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan *World Fact Book*, BPS dan *World Bank*, ditingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009, Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8 %. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1 % per tahun.

Secara umum, persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Indonesia menunjukkan tren menurun secara melambat selama periode 2012-2015. Tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0,3 % pada tahun 2015 adalah yang terkecil sepanjang periode empat tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Nasional, pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen pada tahun 2012 menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,22 persen pada Maret 2015. Namun demikian, semenjak tahun 2013 jumlah penduduk miskin selalu meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2015, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 310 ribu jiwa dari tahun 2014 dan 520 ribu jiwa dari tahun 2013. Peningkatan jumlah penduduk miskin dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya terjadi karena meningkatnya harga beberapa komoditas bahan pokok di pasaran dan naiknya harga bahan bakar minyak. Kemiskinan telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi mereka yang miskin, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kemiskinan juga disinyalir berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan; tingkat kesehatan masyarakat yang terabaikan, aspek kualitas pendidikan yang tidak merata, marginalisasi dan diskriminasi, dalamnya jurang ketimpangan antara yang kaya dan miskin, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi munculnya perilaku kriminalisasi, misalnya, aksi pencurian, perampokan, penjarahan yang dimotori oleh kemiskinan. Kenyataan ini kembali menguatkan bahwa kemiskinan merupakan penyakit sosial yang harus segera diatasi.

Konsep al-Qur'an Tentang Kemiskinan

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai 'budak' belaka. Bahkan di antara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin.

Dalam menjelaskan konsep kemiskinan ini, al-Qur'an biasa menggunakan term *faqîr* dan *miskîn*. Secara etimologis, lafadz *faqîr* berasal dari kata *faqura-yafquru-*

faqârah, yang maknanya lawan dari kaya (al-ghina). Selain faqura, dengan dlamah pada ‘ain fi’il-nya, kata faqîr juga dijumpai pada kata kerja faqara—fathah pada ‘ain fi’il-nya yang memiliki makna hafara yang artinya menggali atau melubangi, hazza wa assara fih yang artinya memotong dan memberi bekas, al-dâhiyah wa al-musîbah al-syadîdah yang artinya malapetaka dan musibah yang dahsyat, seperti yang dijumpai dalam QS. al-Qiyamah: 25. Namun Al-Isfahani melontarkan akar etimologis yang berbeda mengenai lafadz faqîr. Di dalam memaknai lafadz faqîr, al-Isfahani berpendapat bahwa lafadz faqîr berasal dari kata al-maksûr al-fiqâr yang berarti patah tulang punggungnya. Hal tersebut menunjukkan beratnya beban yang dipikul sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Sedangkan secara terminologis, banyak ulama yang mengemukakan makna terminologis tentang faqîr, salah satunya pendapat Abi Abdullah al-Qurtubiketika menginterpretasikan QS. Al-Taubah ayat 60. Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. (QS. Al-Taubah (09) : 60).

Menurutnya, setidaknya ada 10 pendapat yang menjelaskan tentang makna faqîr. Di antaranya pendapat yang mengemukakan bahwa *al-fuqarâ'*, *mufrad* kata *faqîr*, menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefaqiran hidupnya.

Berikutnya term yang banyak digunakan untuk menunjukkan orang yang lemah secara ekonomi adalah term *miskîn*. Secara etimologis, lafadz *miskîn* merupakan *isim masdar* yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukûn/miskîn*. Dilihat dari asalnya, *sakana-sukûn*, kata ini memiliki makna diam, tetap atau reda. Al-Asfihani dan Ibn Mansur mengartikan kata ini sebagai tetapnya sesuatu setelah ia bergerak. Selain arti tersebut, kata *sakana-sukûn* juga bisa diartikan sebagai tempat tinggal.

Pendekatan KUBE

KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin, yang meliputi : terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan kelompok sosial, seperti : pengembangan hubungan yang semakin harmonis, pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, munculnya sikap kemandirian, munculnya kemauan, dan lain-lain, sehingga menjadi sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pendekatan KUBE ini diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, seperti : pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak ikan, pemanfaatan tenaga yang menganggur untuk menjadi tenaga kerja di KUBE yang dikelola, dan lain-lain. Diharapkan dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok. Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari komposisi ini, pendekatan KUBE merupakan pendekatan yang relevan di dalam pemberdayaan kelompok miskin tersebut.

Kendala dan Hambatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kenyataannya di lapangan tidaklah selalu indah karena berbagai kendala dan hambatan dihadapi. Proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, bagaimana bantuan yang diberikan, bagaimana pendampingan yang dilakukan, dan lain-lain. Sebagian KUBE terbentuk atas inisiatif anggota, sebagian karena gagasan atau bentuk aparat desa atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam pengelolaannya juga demikian, ada KUBE yang memang murni dikelola oleh anggota dan sebagian ada pihak yang terlibat karena ada kepentingan, dan masalah-masalah lainnya. Tetapi keberhasilan dan kegagalan KUBE tidak bisa hanya dilihat dari sisi sebelah mata, hanya menyalahkan pihak eksternal yang mungkin terlibat, yaitu karena adanya campur tangan pihak luar. Namun masalah-masalah yang bersifat internal juga perlu dikaji dan dianalisis, seperti sifat dan unsur-unsur yang ada dalam kelompok, seperti keanggotaan, struktur kelompok dan lain-lain. Harapan kedepan untuk menjadikan KUBE sebagai suatu pendekatan dalam proses pemberdayaan perlu dikaji kembali, sehingga benar-benar menjadi suatu pendekatan yang dapat menjadi satu alternatif penanganan atau model di dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dimana upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik.

KUBE merupakan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan.

Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Makassar

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam pembahasan ini dapat secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

Terkait bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), program ini awalnya merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Dinas Sosial sebagai bagian dari Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan UEP dan program bantuan KUBE dengan pemberian bantuan berupa peralatan dan bahan sesuai dengan usaha yang diinginkan. Program bantuan UEP dan program bantuan KUBE merupakan program-program andalan Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yakni membantu keluarga miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, pelaksanaan program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memajukan pembangunan nasional, khusus pada sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun program yang diupayakan pemerintah dalam memajukan pembangunan ekonomi yaitu program bantuan UEP. UEP adalah kegiatan dibidang ekonomi yang

dilaksanakan oleh rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Program UEP merupakan salah satu kegiatan program pemberdayaan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan memberikan bantuan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif atau memberikan bantuan modal berupa alat dan bahan untuk usaha yang akan digeluti. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan bagi keluarga fakir miskin, sehingga mampu bangkit dari keterpurukan. Program bantuan UEP merupakan media yang strategis, efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi keluarga fakir miskin sebagai bentuk perwujudan dari amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1) dan (2), serta Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Program UEP diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mendorong pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga fakir miskin untuk berkembang. Sasaran penerima bantuan UEP diprioritaskan kepada keluarga fakir miskin yang terdaftar pada kantor kecamatan atau kelurahan. Sasaran *outcome* dari kegiatan UEP adalah meningkatnya kegiatan usaha masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, meningkatnya pendapatan serta berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi.

Kesimpulan

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai budak belaka. Bahkan diantara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin. Dalam menjelaskan konsep kemiskinan ini, al-Qur'an biasa menggunakan term *faqîr* dan *miskîn*.

Sedangkan secara terminologis, banyak ulama yang mengemukakan makna terminologis tentang *faqîr*. Salah satunya pendapat Abi Abdullah al-Qurtubi, ketika menginterpretasikan QS. Al-Taubah ayat 60 yang artinya : sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. (QS. Al-Taubah (09) : 60).

Berikutnya *term* yang banyak digunakan untuk menunjukkan orang yang lemah secara ekonomi adalah *term* *miskîn*. Secara etimologis, *lafadz* *miskîn* merupakan *isim masdar* yang berasal dari *sakana yaskunu sukûn/miskîn*. Dilihat dari asalnya, *sakana sukûn*, kata ini memiliki makna diam, tetap atau reda. Al-Asfihani dan Ibn Mansur mengartikan kata ini sebagai tetapnya sesuatu setelah ia bergerak. Selain arti tersebut, kata *sakana sukûn* juga bisa diartikan sebagai tempat tinggal.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan keterampilan khusus bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada, sehingga akan bermanfaat secara optimal.
2. Perlu adanya peningkatan SDM dengan mengikut para anggota KUBE dalam pelatihan atau *life skill* yang diadakan oleh pemerintah.
3. Perlu adanya dukungan dari pemerintah yang lebih intensif, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah dan pusat, agar perkembangan KUBE lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Majd al-Dîn al-Fayruz. 1999. *Qâmus al-Muhît*. Beirut : Dar al-Fikr al-Tiba'ah wa al-Nasyr al-Tawzi.

- Agussalim. 2009. *Mereduksi Kemiskinan, Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*. Makassar : Nala Cipta Litera.
- Arief, Hasrat, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- BPS. 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2014*. Makassar : Badan Pusat Statistik.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Jacques, Jean Rousseau. 1986. *Kontrak Sosial*. Terjemahan Sumarjo. Jakarta : Erlangga.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Semarang : P.T. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Talidziduhu. 2003. *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : P.T. Asdi Mahasatya.
- Ndraha, Talidziduhu. 2003. *Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : P.T. Asdi Mahasatya.
- Rasyid, Ryas. 1997. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta : P.T. Yasrif Watampone.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah : Tugas Pokok dan Fungsi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.